

Implikasi Kebijakan Luar Negeri Netralitas Aktif Turki Sebagai Mediator Invasi Rusia ke Ukraina 2022

Hanum Juselvia Azzahra¹, Hendra Maujana Saragih²

^{1,2} Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Nasional

e-mail: hanumjuselvia@gmail.com¹, hendramaujanasaragih@civitas.unas.ac.id²

Abstrak

Perluasan gejolak geopolitik saat ini membentuk konfrontasi baru akan polarisasi lingkungan politik internasional. Tulisan ini membahas terkait bentuk kebijakan luar negeri netralitas aktif Turki dalam mengambil posisi mediator tensi konflik invasi Rusia dan Ukraina tahun 2022. Intensitas konflik Rusia dan Ukraina menimbulkan polemik instabilitas kondisi global yang berdampak kedalam gangguan pasokan pangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan dan teori kebijakan luar negeri netralitas aktif sebagai pisau analisis kajian pembahasan sikap dan posisi Turki untuk tujuan menyeimbangkan kepentingan politik dan ekonomi negaranya. Metode penelitian yang digunakan adalah model kualitatif dengan metode kajian pustaka dari sumber-sumber ilmiah yang valid. Hasil dari penelitian ini adalah meski menimbulkan konflik kepentingan dengan sekutu barat, atas dasar olah pertimbangan kepentingan domestiknya. Inisiatif diplomatik atas pembukaan ekspor biji-bijian di Laut Hitam yang ditengahi oleh Turki menjadi salah satu contoh pendekatan peredaman konflik yang sukses memberikan keseimbangan kepentingan bagi stabilitas kawasan dan global.

Kata kunci: *Turki, Global, Barat, Sanksi, Kepentingan*

Abstract

The current expansion of geopolitical turmoil is shaping a new confrontation, leading to the polarization of the international political landscape. This article discusses the form of active neutrality in Turkey's foreign policy, focusing on its position as a mediator in the tensions between Russia and Ukraine during the invasion in 2022. The intensity of the conflict between Russia and Ukraine has sparked debates on global instability, which has had an impact on food supply disruptions. This research employs the active neutrality approach and theory of foreign policy as analytical tools to examine Turkey's stance and position in balancing its political and economic interests. The research methodology used is a qualitative model, utilizing literature review from credible scholarly sources. The findings of this study reveal that, despite conflicting interests with Western allies, Turkey's decisions are based on careful considerations of its domestic interests. The diplomatic initiative of facilitating grain exports in the Black Sea, mediated by Turkey, serves as a successful example of conflict mitigation approach that provides a balance of interests for regional and global stability.

Keywords: *Turkey, Global, West, Sanction, Interest*

PENDAHULUAN

Pergerakan dinamis dalam arena politik global menghadirkan ragam dinamika baru. Mengharuskan setiap negara berupaya untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi untuk dapat mempertahankan eksistensi dan keamanan nasionalnya. Berangkat dari ragam pertimbangan kepentingan nasional, menjadi aspek dalam merumuskan arah kebijakan luar negeri suatu negara (Wicaksana, 2007). Demikian kita membicarakan kepada dinamika politik internasional hari ini telah membentuk kepada suatu lingkungan multipolar. Hal ini tentu memberi pengaruh

terhadap bentuk kebijakan luar negeri suatu negara untuk dapat menyesuaikan diri dalam arena persaingan politik internasional.

Turki menjadi salah satu negara kekuatan menengah yang sedang berproses menuju kebangkitan eksistensi dan posisi strategisnya sebagai pemain kawasan dalam mencapai sentralitas peranannya di regional maupun global. Republik Turki berdiri dari puing puing keruntuhan kekaisaran Ottoman di masa Perang Dunia 1. Mustafa Kemal sebagai bapak pendiri Republik Turki menjadikan barat sebagai kiblat atau fondasi kuat sekularisme negara itu (Bozdağlıoğlu, 2008). Namun, saat ini telah hadir sosok pemimpin kuat baru di negara itu yakni Recep Tayyip Erdogan yang telah memegang tonggak kekuasaan selama 2 dekade. Erdogan memiliki ambisi politik untuk membalikan wajah sekuler Turki yang sarat akan radikalisme citra islam itu melalui kolaborasi orientasi religius dan nasionalis (Martin, 2022).

Berangkat dari akar agenda dalam negeri, pergeseran kebijakan luar negeri Turki berproses kepada bentuk citra negara kuat dan independen. Dilihat daripada persaingan menuju sentralitas posisi Turki pada sejumlah isu regional dan global (Kubicek, 2022). Perumusan bentuk kebijakan luar negeri di masa ini terbentuk atas kehendak politik untuk mendirikan Turki sebagai kekuatan baru yang independen dan mandiri didalam rangkaian posisi netralitas aktif dalam menyikapi isu-isu luar negeri. Meski memiliki label sebagai mitra resmi aliansi pertahanan sekutu barat yaitu *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) sejak tahun 1952. Tak menjadi penghalang Turki menunjukkan ketegasan untuk bertolak dari kolektivitas aliansi yang dirasa kurang menguntungkan bagi kepentingan nasional Turki.

Merujuk kepada isu pergolakan geopolitik yang masih panas saat ini yaitu invasi Rusia ke Ukraina 2022 yang menyebabkan instabilitas politik maupun ekonomi global. Negara-negara barat segera memberi respon aktif atas agresi Rusia yang mengancam kebangkitan mantan sang prakarsa timur itu. Bantuan amunisi pertahanan kepada Ukraina terus berjalan, dibarengi dengan pemberlakuan paket sanksi kolektif dengan tujuan melemahkan perekonomian Rusia (Adib Izzuddin, 2022). Nyatanya, tak semua sekutu barat kompak menerapkan paket sanksi itu. Turki menjadi salah satu negara yang enggan untuk mengaktifkan persanksian sebagai cara untuk meredam dan memojokan pihak agresor.

Bukan tanpa sebab, dalam politik segala sesuatu memiliki perhitungannya tersendiri. Turki memiliki hubungan baik dengan Ukraina maupun Rusia. Alasan daripada Turki tidak ikut memberlakukan paket sanksi terhadap Rusia dilandasi atas keinginan Turki untuk bisa menyeimbangkan posisi di kawasan. Dibalik alasan diplomatis tersebut, Turki dan Rusia menjalin hubungan ekonomi bilateral yang membuat Turki cukup bergantung besar. Hal ini membuat Turki menimbulkan dilema akan komitmennya sebagai mitra strategis aliansi pertahanan barat.

Disamping memposisikan negaranya dalam kenetralan untuk tidak menekan satu pihak secara terang-terangan. Turki mengambil langkah aktif dengan memainkan peran sebagai mediator konflik. Hal ini dapat dikatakan sebagai wujud untuk menyangkal skeptisme kubu barat terhadap negaranya. Turki berupaya menghadirkan pendekatan yang dapat memberi keuntungan seimbang tak hanya untuk meredam perselisihan Rusia dan Ukraina, tetapi juga bentuk kontribusinya kepada mitra aliansi pertahanan barat.

Tulisan ini akan mengkaji bagaimana Turki berusaha memainkan peran seimbang dalam menyikapi gejolak geopolitik kontemporer invasi Rusia ke Ukraina. Berangkat dari implikasi kebijakan luar negeri netralitas aktifnya membuat Turki mengambil sikap yang cukup berbenturan dengan kolektivitas sekutu barat dalam mencapai tujuan sanksi ke Rusia. Hal ini didasari atas pertimbangan taruhan Turki untuk dapat menjaga keamanan dan kepentingan nasional pasca perang berakhir. Serta menjadi bagian daripada pencapaian ambisi Erdogan untuk membangun independensi Turki sebagai kekuatan baru di regional.

METODE

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode eksplanasi. Dalam penyajian penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yang mana dalam kajiannya menggunakan teknik analisis data dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman penulis maupun pembaca dalam melihat fenomena, aktivitas, atau

proses sosial (Bakry: 2019). Tujuan dari penggunaan metode kualitatif ialah untuk menjelaskan terkait olah kajian suatu fenomena sosial, berupaya untuk menemukan hipotesis dari fenomena pembahasan.

Pada jenis penelitian kualitatif dalam tulisan ini didukung dengan metode eksplanasi. Bertujuan untuk menemukan penjelasan terkait pertanyaan permasalahan yang diajukan. Adapun olah teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data sekunder melalui teknik studi pustaka. Berasal dari sumber-sumber karya ilmiah serta situs berita yang tersedia dan tentunya relevan dengan topik pembahasan. Untuk kemudian data tersebut dianalisis menggunakan pisau teori sehingga mampu menghasilkan hasil diskusi terkait penerapan kebijakan luar negeri netralitas aktif Turki dalam menyikap tensi gejolak invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022. Yang menghadirkan dilema kepentingan antar sekutu barat terkait penerapan paket sanksi untuk melemahkan sektor perekonomian Rusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergolakan Invasi Rusia ke Ukraina 2022

21 Februari 2022 Presiden Rusia, Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus ke wilayah Ukraina. Langkah ini menjadi puncak daripada kompleksitas ketegangan hubungan kedua negara yang kian berangsur pasca aneksasi krimea 2014. Meletusnya konflik ini menuai ragam reaksi serta perhitungan dampak-dampak kerugian yang tak hanya menyelimuti antar dua negara tersebut. Melainkan bagaimana gelombang instabilitas yang menegani tiap fitur dinamika global baik politik, ekonomi, dan sosial.

Agresi militer yang dilakukan Rusia ke Ukraina disebut sebagai perpecahan perang terbesar pasca Perang Dunia Kedua. Sasaran invasi ini merupakan bentuk atas ambisi imperialisme Putin untuk membangkitkan kembali kekaisaran Soviet (Woolley, 2022). Pasca aneksasi krimea 2014, Ukraina yang merupakan mantan satelit Soviet kala itu berkeinginan untuk lepas daripada pengaruh Soviet dengan berjalan mencapai perlindungan barat yang lebih demokratis. Salah satu upaya yang dilakukan dengan membawa negara itu untuk menjadi bagian dari keanggotaan aliansi pakta pertahanan barat *North Atlantic Treaty Organization* (NATO). Namun hingga saat ini keinginan itu belum terwujud dan bahkan menjadi boomerang baru dalam kenaikan intensitas hubungannya dengan Rusia.

Meski belum menjadi sekutu resmi barat, Ukraina menuai dukungan penuh dari Amerika Serikat dan sekutunya atas agresi militer yang dilakukan Rusia. Menyiasati keterlibatan eksternal, Putin telah lebih dulu mengeluarkan ultimatum bagi pihak yang berusaha ikut campur mengganggu urusan Rusia dengan Ukraina (Muhamed, 2022). Tentu sang mantan rival di era Perang Dingin tak akan tinggal diam. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden menyampaikan bahwa dunia akan meminta pertanggung jawaban Rusia. Amerika Serikat dan sekutunya akan bersatu menindaklanjuti perang terencana Putin yang menyebabkan kerugian masif di multisektor kehidupan rakyat Ukraina bahkan dunia (Muhamed, 2022).

Paket Sanksi Kolektif Barat Atas Rezim Rusia

Bertepatan ketika Rusia melancarkan aksi serangan militer ke Ukraina. Amerika Serikat dan sekutunya telah bersiap melepaskan serangkaian sanksi ekonomi kepada Rusia. Menargetkan lembaga negara, oligarki, serta para elit yang berpihak kepada Putin (Gaur, 2023). Paket sanksi yang dikeluarkan bertujuan untuk melemahkan sektor perekonomian Rusia guna menekan modal akomodasi peralatan militer yang mendukung serangan ke Ukraina.

Respon aktif barat dalam penerapan paket sanksi terhadap Rusia menciptakan lingkaran baru atas perang ekonomi. Pihak barat menganggap pilihan ini menjadi cara efektif yang mampu memutus Rusia dari pasar keuangan internasional. Departemen Perdagangan, Biro Industri dan Keamanan Amerika Serikat juga telah mengambil tindakan cepat dan tegas untuk memberlakukan kontrol ekspor yang ketat terhadap Rusia. Kontrol ekspor dilakukan meliputi pembatasan akses Rusia ke teknologi tertentu dan item lain yang diperlukan untuk mempertahankan aktivitas militernya di Ukraina (U.S. Department of Commerce, 2022).

Diketahui tak semua sekutu barat mengaktifkan paket sanksi ekonomi dan finansial ke Rusia. Terdapat negara negara yang memilih untuk menghindari penerapan sanksi, salah satunya ialah Turki. Meski berposisi sebagai mitra aliansi strategis pertahanan barat sejak lama. Olah kepemimpinan Erdogan berhasil menguasai pemerintahan dengan orientasi baru dalam kebijakan luar negeri Turki yang menunjukkan gelagat untuk berpaling dari kolektivitas barat sepenuhnya (Kubicek, 2022). Dengan berupaya menunjukkan sentralitas Turki sebagai kekuatan regional yang independen dalam mencapai ambisi politiknya.

Dalam kondisi ini, Turki berupaya memainkan pendekatan yang berbeada antara aspek politik dan ekonomi (Pearson, 2022). Di sisi politik, Turki menyatakan bahwa invasi Rusia ke Ukraina tidak dapat diterima. Mengutuk tindakan Rusia untuk menginvasi teritori Ukraina yang merupakan negara berdaulat. Selain itu, Turki juga tidak pernah mengakui aneksasi Krimea dan Donbas oleh Rusia pada tahun 2014. Mengetahui terdapat kelompok etnis Tatar Turki yang juga tinggal disana. Membuat pihaknya mengecam tindakan Rusia terkait adanya unsur pelanggaran hak asasi manusia (Pearson, 2022). Di sisi ekonomi, Turki dan Rusia menjalin hubungan bilateral antar industri ekonomi dan militer. Komoditas biji-bijian juga energi Rusia berkontribusi besar bagi kebutuhan domestik Turki.

Adapun dalam pembangunan proyek program nuklir Akkuyu, Rusia berperan besar dalam menyokong komoditas hingga pengetahuan terkait program nuklir Turki. Guna menjaga keseimbangan posisinya, Turki menjadi salah satu negara yang bergerak mengupayakan langkah perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Mengimplikasikan kebijakan luar negeri untuk dapat mencapai perimbangan kepentingan dan pencegahan perluasan dampak konflik yang berkepanjangan.

Kebijakan Luar Negeri Turki

Orientasi geopolitik menggeser paham Kemalis yang menjadikan barat sebagai kiblat sekularisme pendirian Republik Turki. Unsur demokratisasi serta jalinan pasar ekonomi yang menjanjikan menjadi aspek strategis dalam memodernisasi negara itu. Melihat kepada keunggulan terkait letak geografis Turki yang berada di persimpangan tiga benua memberikan potensi besar untuk membawa negara itu mampu memainkan peran strategis sebagai pemain kawasan.

Hanya saja di era Perang Dingin sikap Turki terhadap Laut Hitam dinilai sangat pasif, oleh sebab keadaan bipolaritas yang terjadi saat itu. Namun Turki hari ini menunjukkan adanya pergeseran kebijakan luar negeri yang kian hari semakin terasa nyata. Pemerintahan saat ini berupaya menghadirkan ruang terhadap identitas lain seperti islamis, Turkish, eurasianism, dan neo-ottoman (Kubicek, 2022). Pergerakan agresif menandai kebangkitan Turki untuk tujuan sentralisasi peranannya sebagai kebangkitan kekuatan menengah di regional dan global. Nahkoda kepemimpinan Erdogan membuat negara itu tak lagi pasif memainkan perannya sebagai pemain global pasca periode perang dingin.

Ditunjukkan oleh pembentukan suatu karakteristik utama geografis Turki meliputi kawasan Laut Hitam. Diantara olah kebijakannya yakni melindungi integritas wilayah negara-negara di kawasan, serta turut mempromosikan stabilitas dan pemeliharaan perdamaian (Muhamed, 2022). Dengan ini kasus invasi Rusia dan Ukraina menjadi salah satu ajang pertunjukan efektifitas independen negara itu. Dapat dikatakan bahwa letak geografis menjadi keunggulann tersendiri bagi Turki. Geografis menjadi aspek yang membawa ragam pertimbangan menarik baik dari segi politik maupun ekonomi untuk Turki dapat memainkan peran di kawasan.

Tensi geopolitik Rusia di Ukraina telah menghadirkan respon kuat barat untuk mendorong mundur Rusia dari batas integritas teritori Ukraina. Bantuan amunisi barat terus dikerahkan ke ukraina, disertai penerapan paket sanksi ekonomi dan finansial. Namun, Turki menunjukkan sikap yang bertolak dengan kolektivitas sekutu barat. Sejatinya bukan kali ini sorotan sikap kontroversial Turki dalam internal aliansi barat terjadi. Kilas balik saat aneksasi Krimea 2014 lalu, Turki juga berupaya menghindari penerapan sanksi barat (Kadorah, 2022). Jelas menimbulkan isu yang mempertanyakan bagaimana bentuk dimana kebijakan luar negeri Turki berdiri.

Namun, pada 23 Februari 2022 Erdogan memberi tanggapan atas penandatanganan Putin terkait dekrit yang menyatakan pengakuan kemerdekaan dua wilayah Ukraina di Donbas. Melalui sambungan telepon Erdogan menyatakan bahwa "Türki tidak akan mengakui pelanggaran apa pun terhadap integritas teritorial Ukraina dan mengatakan bahwa negaranya tetap berdedikasi pada upaya de-eskalasi." (Konarzewska, 2022).

Dapat dilihat bahwa Turki masih dapat memainkan posisi imbang untuk menetralsir posisi keanggoatannya di NATO. Sikap Turki dalam menanggapi gejolak konflik saat ini rupanya mengadopsi tindakan penyeimbangan penting yang secara luas dikenal sebagai "netralitas pro-Ukraina" (CNN, 2023). Konsep kebijakan ini tentu menjadi sorotan menarik mempertanyakan dimana posisi Turki sebenarnya. Karenanya kita perlu memahami lebih dulu hubungan Turki dengan Rusia dan Ukraina.

Hubungan Turki Dengan Rusia dan Ukraina

Dipahami bahwa pada dasarnya pola pemberian sanksi ditujukan untuk merubah perilaku objek sanksi. Namun, negara-negara Uni Eropa, Amerika Serikat dan para mitranya telah memperkenalkan beberapa putaran sanksi untuk Rusia dalam upaya untuk menurunkan mesin perang dan melemahkan roda perekonomian. Hal ini membawa dilema bagi Turki untuk turut serta menekan posisi Rusia. Mengetahui sebelumnya kompleksitas hubungan antara Turki dan Rusia masih bergelut dalam tensi adu militer terkait konflik regional di Suriah dan Kaukasus Selatan. Selain memiliki hubungan yang rumit dengan Rusia.

Terlepas dari itu, kondisi dilema Turki untuk menekan posisi Rusia saat ini dikarenakan oleh kemitraan strategis terkait sektor perekonomian yang telah terbangun selama dua dekade. Kemitraan itu meliputi ketergantungan besar Turki terhadap pasokan gas alam dan minyak Rusia. Kemudian juga melihat kepada angka pariwisata turis Rusia yang menempati nomor satu sebagai penyumbang devisa Turki (CNN, 2023). Disisi politik, Turki memosisikan dirinya mendukung penuh kedaulatan teritori Ukraina. Secara terbuka tidak menganggap apa yang dilakukan Rusia sebagai tindakan legal. Erdogan juga menekankan bahwa Ukraina merupakan salah satu mitra penting untuk memastikan stabilitas, keamanan, perdamaian, serta kemakmuran kawasan.

Merujuk kepada pasokan impor komoditas biji-bijian Turki dari Ukraina. Selain itu, sebelum konflik dengan Rusia pecah, tepat pada 3 Februari 2022 antara Turki dan Ukraina telah resmi menandatangani perjanjian pertahanan menandakan puncak negosiasi keduanya selama 12 tahun (Kaddorah, 2022). Kemitraan militer yang dibangun meliputi hubungan transaksional terkait penjualan drone Turki ke Ukraina. Sempat terjadi gesekan hubungan Rusia terhadap Turki yang disebabkan oleh pembelian 12 drone Bayraktar Turki oleh Ukraina. Drone tersebut memiliki kapabilitas yang luar biasa dan mematikan, dengan pasukan Ukraina berhasil mengoperasikan drone Bayraktar.

Keberhasilan ini dianggap sebagai salah satu simbol paling terkenal terkait bentuk perlawanan Ukraina terhadap agresi Rusia (Nailia 2022). Kesuksesan serangan persenjataan drone Turki sangat menguntungkan sebab, harga drone Turki yang relatif sukses menciptakan gangguan antara struktur politik dan militer Rusia. Tetapi, gesekan itu tak berlangsung lama. Bantahan bahwa kemitraan militer telah dibangun sebelum perang terjadi menjadi landasan pertimbangan Rusia.

Paparan diatas menunjukkan bagaimana Turki berusaha memainkan pendekatan berbeda dengan politik untuk Ukraina dan ekonomi untuk Rusia. Menyadari arti penting kedua negara bagi Turki menjadi faktor untuk dapat mengimplikasikan bentuk netralitas yang imbang. Perlu dicatat netralitas yang Turki bangun tak semata untuk menunjukkan kehati-hatian negara itu dalam melindungi keamanan negaranya. Diperlukan langkah aktif sebagai topangan negara itu bilamana dikemudian hari pergolakan konflik Rusia dan Ukraina meluas. Langkah aktif itupun terwujud dengan Turki mengambil peran sebagai mediator untuk mencegah perluasan konflik dan berkontribusi melakukan pendekatan yang menguntungkan.

Peran Turki Sebagai Mediator Atas Inisiatif Diplomatik

Turki dapat dikatakan sebagai contoh aparaturnya yang kurang efektif mendukung langkah kolektivitas sekutu barat untuk menekan Rusia melalui paket sanksi. Status keanggotaannya di NATO menjadi yang dipertimbangkan untuk dapat mengimplikasikan netralitas dalam konflik ini. Karenanya dibutuhkan peran aktif lain untuk Turki mampu memainkan posisi imbang dalam mengukur pencapaian keuntungan yakni dengan mengambil peran sebagai mediator. Salah satu inisiatif diplomasi yang Turki kerahkan merujuk kepada upaya intensifnya gencatan senjata bagi Rusia dan Ukraina.

10 Maret 2022 di kota Antalya, merupakan pertama kalinya Turki berhasil mengadakan meja negosiasi mempertemukan Menteri Luar Negeri Ukraina dan Menteri Luar Negeri Rusia untuk memulai negosiasi gencatan senjata. Namun upaya tersebut belum mampu membuahkan hasil yang diharapkan. Meskipun negosiasi telah meningkatkan harapan untuk kemungkinan penghentian aksi militer, intensifikasi kegiatan militer Rusia di wilayah Ukraina dan peningkatan bantuan militer barat ke Ukraina merupakan beberapa faktor yang mengakibatkan berlanjutnya pertempuran antara kedua negara.

Berlanjut pada 29 Maret 2022, Turki kembali menggelar pertemuan dua hari dihadiri oleh para delegasi Rusia dan Ukraina yang kali ini bertempat di Istanbul. Menghadirkan bahasan baru untuk kedua negara itu saling mengajukan persyaratan untuk bisa dilakukan gencatan senjata. Lagi-lagi negosiasi belum dapat memberikan hasil imbang sebagaimana persyaratan yang diajukan saling tumpah tindih antar kepentingan dua negara. Tensi konflik yang terus memanas semakin memperluas dampak konflik secara signifikan. Krisis kemanusiaan dan persoalan ketahanan pangan membawa narasi kuat untuk komunitas internasional setidaknya bisa lebih dulu menyiasati hal ini.

Menyinggung posisi Rusia dan Ukraina yang merupakan negara sumber penghasil biji-bijian dunia. Perang yang terjadi memecah proses ekspor biji-bijian ke banyak pasar global. Rusia dan Ukraina menyumbang sekitar 30% dari ekspor gandum global, kemudian hampir seperlima perdagangan jagung, dan sekitar 80% ekspor minyak bunga matahari internasional (Jongerden, 2022). Selama lebih dari empat bulan, kapal militer Rusia memblokir pelabuhan Ukraina di Laut Hitam. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa bukan hanya menciptakan gangguan pasokan pangan. Tetapi juga memberi dampak lanjutan atas peningkatan harga pangan, khususnya di negara-negara rentan seperti Libya, Yaman, dan Lebanon (Caprile, 2022).

Bergeser dari upaya untuk mengadakan gencatan senjata, PBB berbalik untuk menginisiasikan peredaman krisis pangan bersama dengan Turki sebagai mediator yang menjembatani perwujudan inisiatif diplomatik atas konflik ini. Kemudian pada 22 Juli 2022 dibentuk sebuah kesepakatan terkait pembukaan ekspor koridor kemanusiaan maritim di Laut Hitam disebut dengan *Black Sea Grain Initiative* (BSGI). Sejak saat itu, lebih dari 1.080 kapal penuh biji-bijian dan bahan makanan lainnya telah meninggalkan tiga pelabuhan Ukraina: Chornomorsk, Odesa, dan Yuzhny/Pivdennyi (Europa Consilium, 2022). Inisiatif ini dipandang Turki sebagai pendekatan yang lebih baik dalam merespon pandangan terkait Turki yang enggan menerapkan kebijakan paket sanksi barat. Turki berusaha memenuhi bagiannya sebagai mediator dengan memanfaatkan keunggulan geografis atas jalur perdagangan di Laut Hitam.

Dampak Mediasi Melalui Kebijakan Luar Negeri Netralitas Aktif Turki

Menyusuri pergerakan politik internasional hari ini yang telah berkembang kedalam suatu bentuk lingkungan multipolar. Turki dibawah kendali kepemimpinan Erdogan dalam proses kebangkitannya sebagai kekuatan menengah, berjalan mengikuti kehendak politik untuk lebih mandiri dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya. Faktor geografis mendukung potensi negara itu untuk mencapi keseimbangan kepentingan regional dan global. Kawasan laut hitam menjadi pusat strategis jalur transaksi dan transportasi yang kritis.

Kawasan ini diandalkan Turki sebagai instrument dalam memenuhi peranannya untuk meredam dampak konflik Rusia dan Ukraina atas peningkatan krisis pangan global. Menganalisis kepada sikap Turki untuk tidak turut serta memberlakukan paket sanksi kolektif

seketu barat terhadap Rusia. Menimbang adanya faktor hubungan negara itu dengan Rusia dalam kemitraan ekonominya. Jelas sikap Turki menciptakan gangguan lingkaran politik kubu barat guna menunjang efektifitas tujuan sanksi terhadap Rusia.

Meski begitu, sikap netral yang diambil Turki tak menjadikan hal itu sebagai tumpuan untuk bermain aman. Sebaliknya, tawaran sebagai mediator Rusia dan Ukraina menjadi celah bagi Turki untuk menunjukkan loyalitas atas posisinya sebagai mitra aliansi pertahanan barat. Dijelaskan sebelumnya dalam hasil pembahasan bahwa upaya dialog yang dilakukan tak kunjung mendapatkan hasil yang diharapkan. Tak berhenti disitu, PBB juga Turki membangun inisiatif diplomatik berkenaan dengan krisis kemanusiaan dan persoalan ketahanan oleh sebab terjadinya gangguan pasokan pangan akibat pemblokiran jalur pelabuhan Ukraina oleh Rusia.

Dengan mengandalkan aspek geostrategis Turki, BSGI diakui sebagai pendekatan peredaman dampak konflik yang tepat. Dengan turut mencegah perluasan konflik, serta pula memberi dampak positif besar terhadap kawasan lain seperti Asia dan Afrika atas lonjakan harga pangan yang hampir mengarah kepada inflasi global. Hal ini menunjukan komparasi efektifitas peran Turki sebagai mediator yang berhasil menghadirkan keseimbangan antara pencapaian kepentingan nasional, serta keseimbangan atas posisi vitalnya sebagai mitra strategis aliansi pertahanan barat.

Meski sempat mendapat tekanan untuk ikut memberlakukan sanksi. Pemimpin negara itu memahami betul potensi negaranya untuk bisa berkontribusi menciptakan perdamaian melalui caranya sendiri. Kehendak politik untuk memandirikan negaranya, berusaha melepas negara itu dari bayang bayang orientasi kebijakan luar negeri tradisional yang kuat akan peran barat.

SIMPULAN

Pemberlakukan paket sanksi barat sebagai respon serangan agresi militer Rusia ke Ukraina menunjukkan kolektivitas barat untuk mempertahankan kedaulatan Ukraina. Melalui penekanan sanksi ekonomi dan finansial bertujuan untuk melemahkan aspek perekonomian yang mendukung teknologi kebutuhan pasukan militer Rusia. Turki mengambil cara tersendiri untuk turut serta mengendalikan instabilitas politik internasional atas tindakan Rusia ke Ukraina menimbulkan gesekan konflik kepentingan dalam kubu aliansi pertahanan NATO.

Dikatakan oleh Erdogan bahwa Turki tidak memiliki masalah dengan Rusia. Tetapi juga tidak tinggal diam terkait operasi militer Rusia ke Ukraina, dengan turut mengutuk tindakan itu di PBB. Dalam penanganan pertikaian ini, Turki tidak menempatkan diri pada satu titik. Secara terbuka menyatakan Turki tidak terikat oleh paket sanksi kolektif barat terhadap Rusia. Keenganan Turki untuk ikut mengaktifkan paket sanksi barat terhadap Rusia karena menimbang bahwa pendekatan untuk maksud meredam konflik dirasa kurang tepat dan strategis.

Karenanya, dibutuhkan pendekatan yang seimbang untuk bisa menghadirkan pendekatan yang beruntung antara pihak yang bertikai bahkan global. Melihat bagaimana Uni Eropa, Amerika, dan negara-negara lain terkena dampak balik dari penerapan sanksi ke Rusia. Seperti krisis pasokan pangan dan lonjakan harga. Tak bisa dipungkiri bahwa banyak negara yang juga bergantung akan komoditas ekspor Rusia. Melalui inisiatif pembukaan ekspor biji-bijian di laut hitam dengan Turki berperan sebagai mediator, didukung geostrategis negaranya.

Demikian berhasil mewujudkan implementasi *Black Sea Grain Initiative* yang secara optimal dalam membuka kembali jalur perdagangan pasokan pangan ke pasar global. Peran aktif Turki dalam mencegah perluasan dampak konflik yang tidak hanya mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan negara-negara barat, tetapi juga membawa dampak baik bagi regional lain seperti Asia dan Afrika. Hal ini menjadi salah satu upaya mediasi yang terbilang sukses dan menunjukkan posisi unik Turki dalam menyeimbangkan posisi negaranya dalam konflik geopolitik saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2022). *The Role of Turkiye in The Black Sea and The Russia-Ukrainian War: A Short Overview*. *Journal of Liberty and International Affairs*, 8(3), 356-367. <https://doi.org/10.47305/JLIA2283356a>
- Bozdağlıoğlu, Y. (2008). *Modernity, identity, and Turkey's foreign policy*. *Insight Turkey*, 55-75.
- Caprile, A., & Members' Research Service. (2022). *Russia's war on Ukraine: Impact on food security and EU response*. European Parliamentary Research Service.
- Jongerden, J., & Vicol, M. (2022). *Crisis and capitalism: A deep dive into the Black Sea Grain Initiative and the global politics of food*. Unpublished Manuscript. Retrieved from https://www.academia.edu/90614276/Crisis_and_capitalism_A_deep_dive_into_the_Black_Sea_Grain_Initiative_and_the_global_politics_of_food
- Kaddorah, E. (2022). *Türkiye and the Debate on Neutrality in the Ukraine War*. Research Paper.
- Konarzewska, N. (2022). *Turkey, Ukraine, and Russia: The Illusion of Neutrality*. *Turkey Analyst*. Retrieved from <https://bit.ly/3MRPEXy>
- Kubicek, P. (2022). *Contrasting theoretical approaches to Turkish foreign policy*. *Turkish Studies*, 23(5), 645-658.
- Lyon, P. (1960). *Neutrality and the Emergence of the Concept of Neutralism*. *The Review of Politics*, 22(2), 256.
- Nailia, B. (2022). *After Ukraine, 'whole world' is a customer for Turkish drone maker says*. Reuters. Retrieved from <https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/exclusive-after-ukrainewhole-world-is-customer-turkish-drone-maker-says-2022-05-30/>
- Pearson, W. R. (2022). *Turkey between Ukraine and Russia*. *Middle East Institute*. Retrieved from <https://www.mei.edu/publications/turkey-between-ukraine-and-russia>
- Qiblawi, T., & Sariyuce, I. (2023, May 19). *Erdogan hails 'special relationship' with Putin ahead of crucial Turkey runoff vote*. CNN. Retrieved from <https://edition.cnn.com/2023/05/19/middleeast/turkey-president-recep-tayyip-erdogan-interview-mime-intl/index.html>
- Tamkoc, M. (1976). *The Warrior Diplomats: Guardians of the National Security and Modernization of Turkey*. Salt Lake City, UT: University of Utah Press U.S. Department of Commerce, Bureau of Industry and Security. (2023). Resources on export controls implemented in response to Russia's invasion of Ukraine. Retrieved from <https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/country-guidance/russia-belarus>
- Weisband, E. (1973). *Turkish Foreign Policy, 1943-1945: Small State Diplomacy and Great Power Politics*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Wicaksana, I. G. (2007). "A Guide to Theory": *Epistemologi Politik Luar Negeri*. *Global dan Strategis*, 1(1), 12-19.
- Woolley, U. (2022). *Ukraine and Putin's Post-Soviet Imperialism*. *Political Insight*, 13(1), 15–17. <https://doi.org/10.1177/20419058221091631>